



LAPORAN PEMANTAUAN ICW

Vonis Kasus Korupsi di Pengadilan
Pasca 3 Tahun Pembentukan Pengadilan Tipikor
(Sem. II 2010 – Sem. I 2013)

C O R R U P T I O N

Disusun oleh: Team ICW

Jakarta, 29 Juli 2013



PENGADILAN TIPIKOR SIAGA I

5 Hakim Tipikor ditangkap KPK

Vonis Tipikor masih tergolong ringan

Latar Belakang

Tujuan Pemantauan Vonis Kasus Korupsi di Pengadilan:

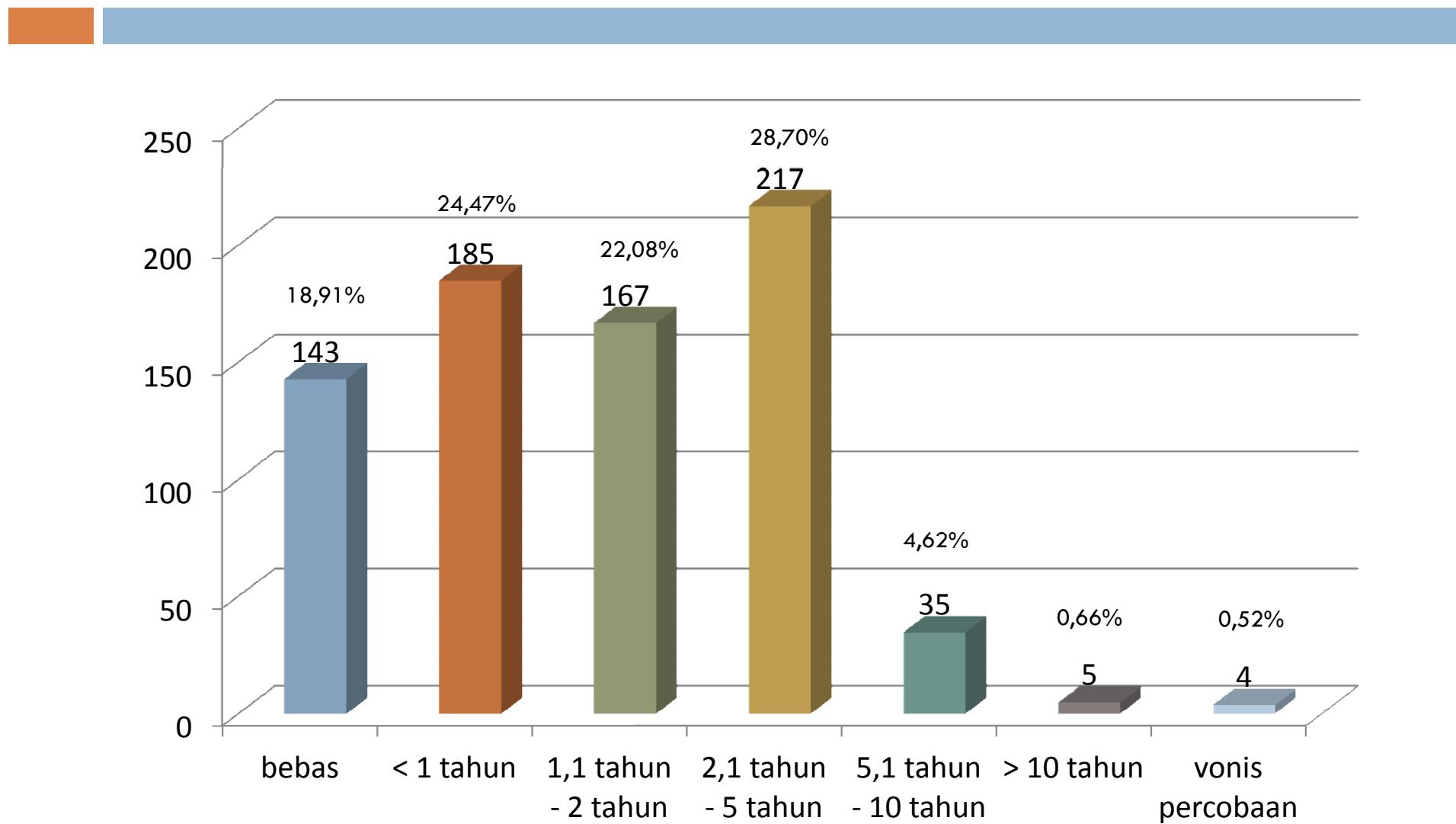
1. Mengukur kinerja pengadilan dalam pemberantasan korupsi
2. Mengetahui trend vonis bebas dan bersalah kasus korupsi 3 tahun terakhir (Sem II 2010- Sem I 2013)
3. Melakukan evaluasi setelah terbentuknya pengadilan Tipikor di seluruh provinsi
4. Memberikan rekomendasi kepada Institusi Peradilan (MA dan Komisi Yudisial)

Waktu dan Ruang Lingkup



- Pemantauan dilakukan terhadap putusan pengadilan dari Semester II Tahun 2010 - Semester I 2013.
- Ruang lingkup pengadilan tersebut meliputi 344 kasus, dengan jumlah terdakwa sebanyak 756 orang.
 - (Cat. Data yang berhasil terpantau ICW, jumlah perkara yang diperiksa dan diputus Pengadilan lebih besar dari yang terpantau)

Tren Vonis Sem II 2010- Sem I 2013



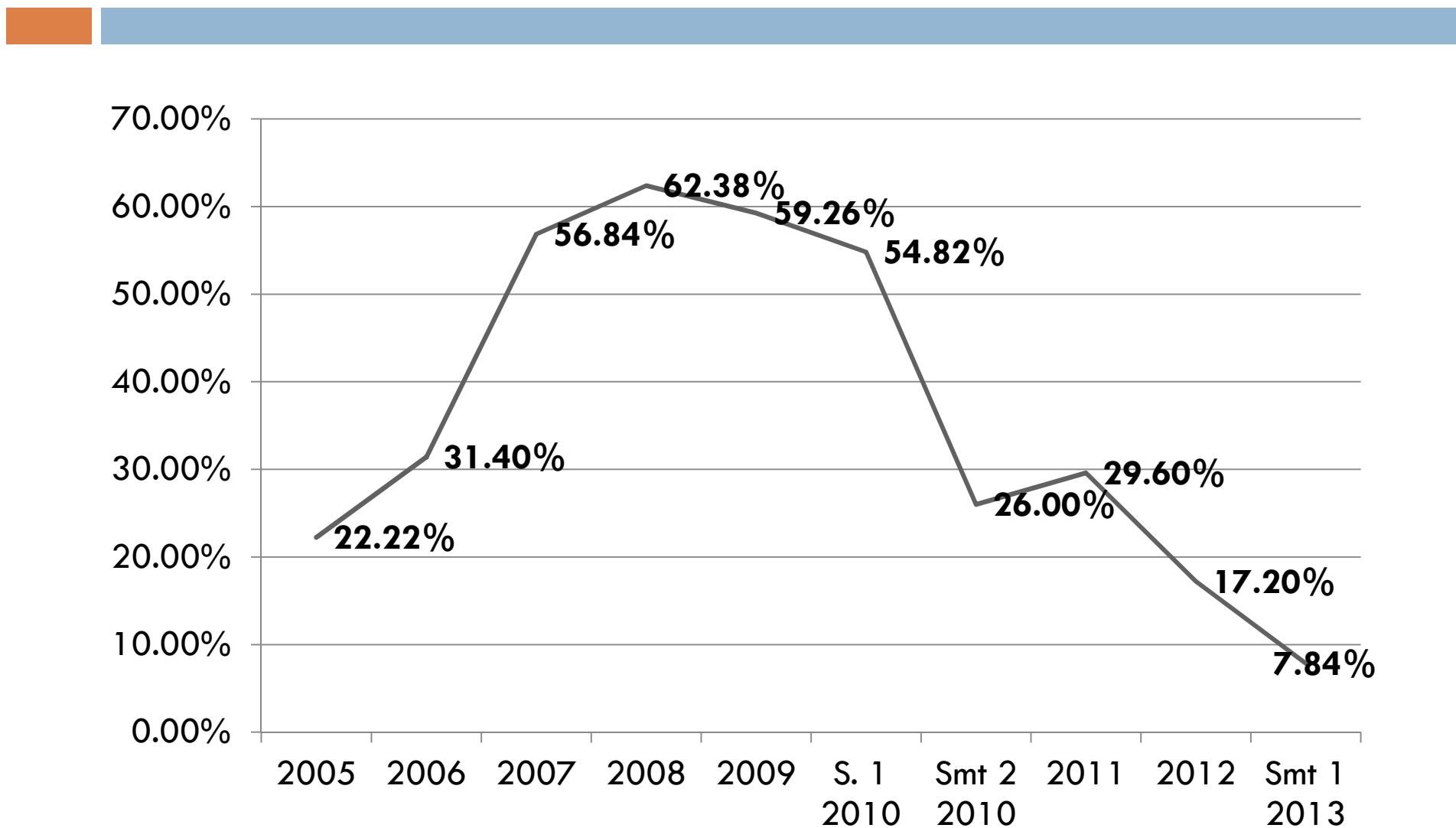
Rekapitulasi Vonis Korupsi 2005- S.1 2010



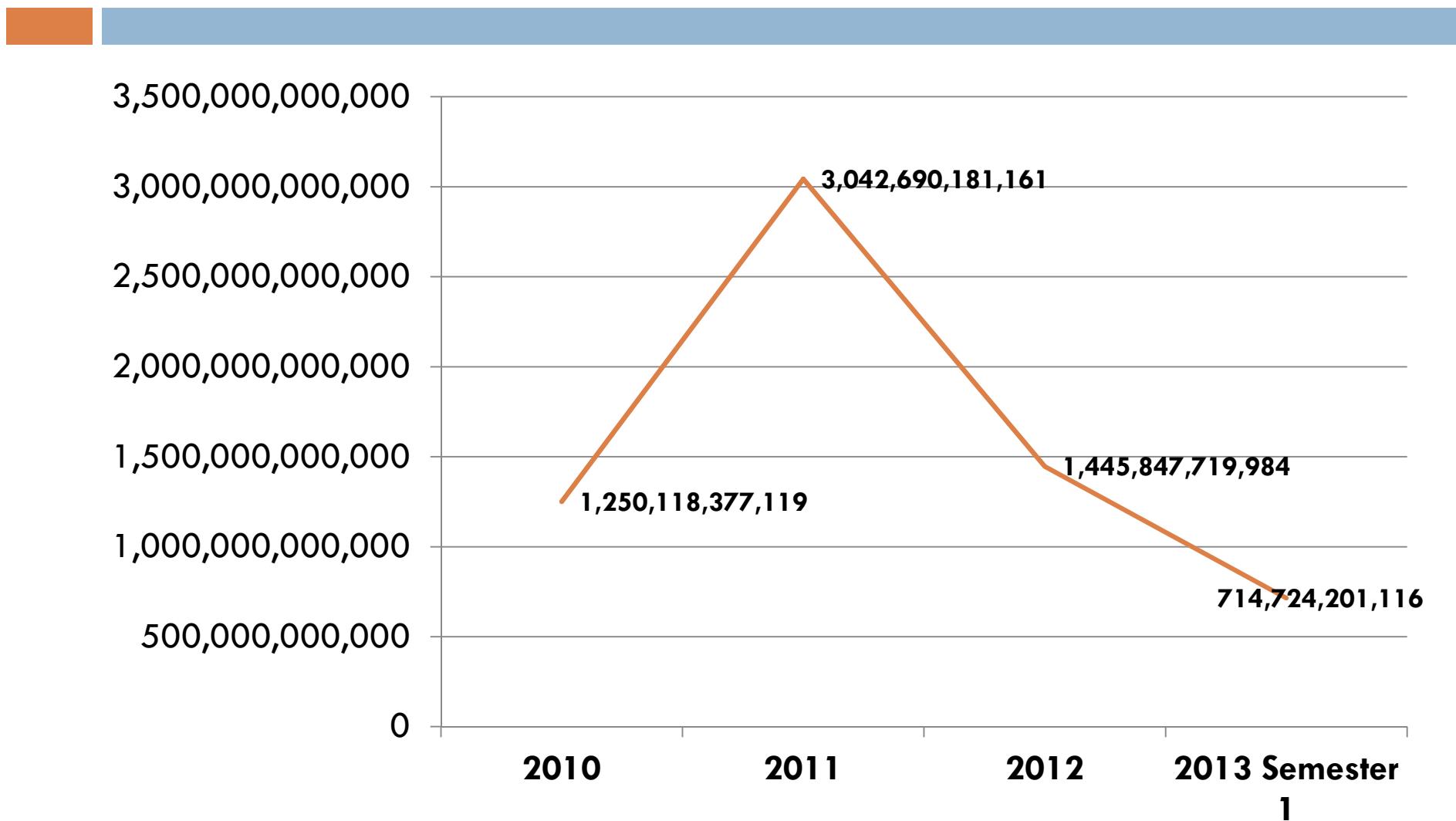
Tahun	Perkara	Terdakwa	Bebas/ Lepas	%	Bersalah	%
2005	71	243	54	22,22%	189	77,77%
2006	124	361	116	31,40%	245	68,60%
2007	166	373	212	56,84%	161	43,16%
2008	194	444	277	62,38%	167	37,61%
2009	199	378	224	59,26%	154	40,74%
S. 1 2010	103	166	91	54,82%	75	45,18%
Smt 2 2010	41	50	13	26,00%	37	74,00%
2011	76	223	66	29,60%	157	70,40%
2012	135	279	48	17,20%	231	82,80%
Smt 1 2013	92	204	16	7,84%	188	92,16%

Total Persentase S II 2010 – S. I 2013 (vonis bebas/lepas = 18,91% , vonis bersalah = 81,09 %)

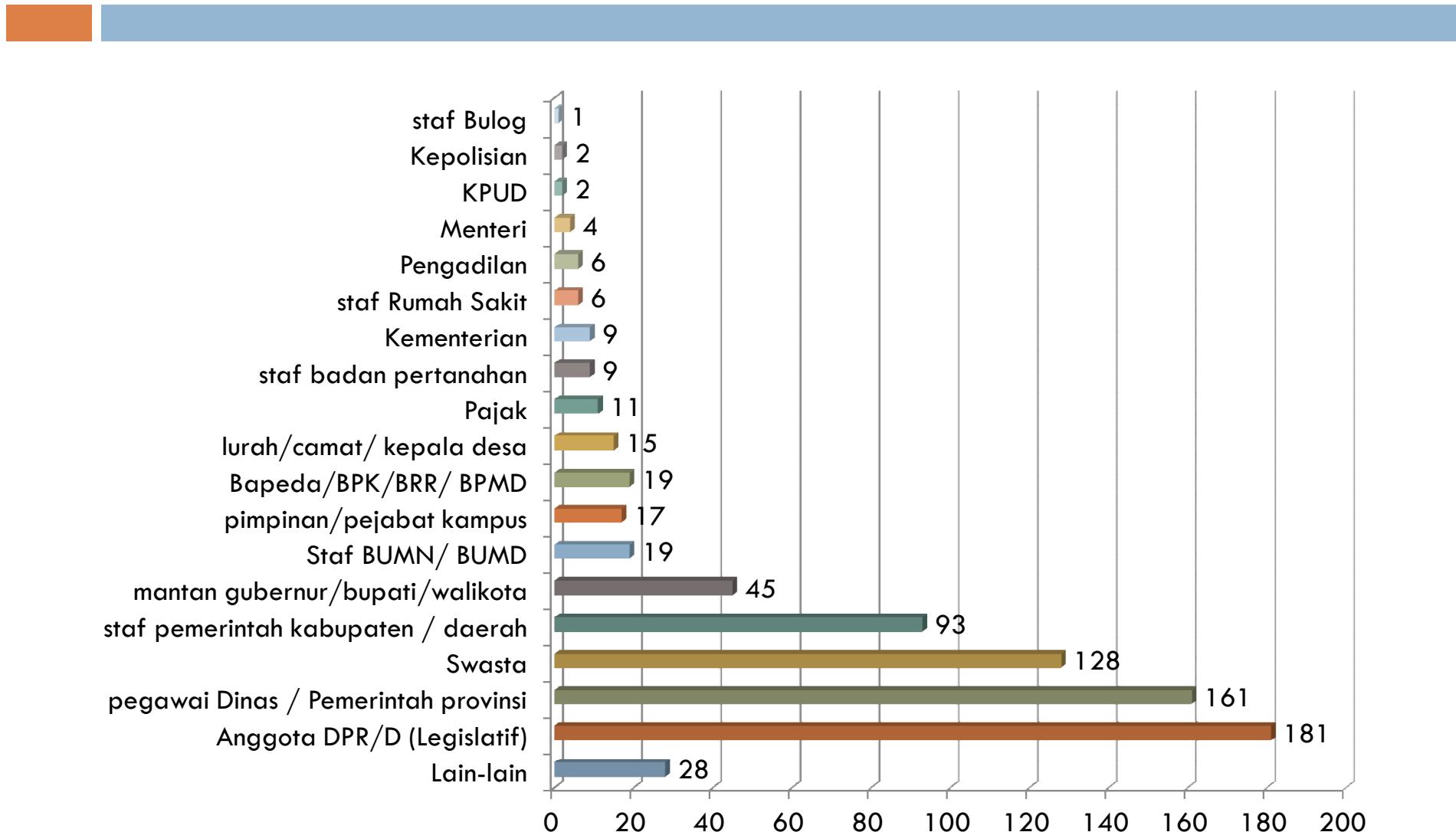
Tren Vonis Bebas 2005 – S 1 2013



Kerugian Negara



Latarbelakang Aktor



Fenomena “Vonis Koruptor”



- Pemantauan ICW terhadap fenomena vonis kasus korupsi di Pengadilan Pasca Pembentukan Pengadilan Tipikor di Seluruh Indonesia (Sem II 2010-Sem I 2013):
 - a) Terpantau: **344 kasus korupsi**, dengan jumlah terdakwa **756 orang**
 - b) vonis bebas/lepas 18,91 %
 - c) vonis bersalah 81,09 %

Hakim Tipikor Jadi Koruptor *



- Kartini Marpaung (Hakim Tipikor Semarang)
 - Heru Kisbandono (Hakim Tipikor Pontianak)
 - Setyabudi (Hakim Tipikor Bandung)
 - Pragsono (Hakim Tipikor Semarang)
 - Asmadinata (Hakim Tipikor Semarang)
-
- * Temuan Komisi Yudisial terdapat 7 hakim tipikor masih nyambi jadi advokat

Pengadilan Tipikor Siaga I



- Ada tren menurun dalam penjatuhan vonis bebas terhadap pelaku korupsi (18,91% sebelumnya tahunnya sebelumnya berkisar 56-59 %) persen), namun vonis bersalah yang dijatuhkan belum memberikan efek jera terhadap pelaku
- Masih munculnya vonis rendah terhadap koruptor sangat melukai rasa keadilan publik sehingga soal pengetatan terhadap remisi koruptor masih relevan
- Keberadaan hakim tipikor dan kinerja Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia perlu diwaspadai

Selamatkan Pengadilan Tipikor!



- Mahkamah Agung harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
 - Evaluasi menyangkut kinerja, seleksi, budget
 - Selama evaluasi perlu dilakukan “moratorium” seleksi hakim tipikor
- Mahkamah Agung harus memberikan tekanan dan arahan agar koruptor divonis seberat-beratnya
- Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu memperketat fungsi pengawasan dan pemberian sanksi yang keras serta mendorong proses hukum



Tim Penyusun

Team Hukum ICW

Tama S Langkun- Lalola Easter- Emerson Yuntho

Magang

Angriyani S. – Haula – M. Ridho – Alwin H

CORRUPTION